



YK

Satria
Harsa
pdin

Laporan Kinerja **2024** Instansi Pemerintah

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM
Kota Yogyakarta

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Yogyakarta


Drs. Tri Karyadi Riyanto R., SH., M.Si
NIP. 196701191992031105

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1, kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, memiliki dua indikator kinerja yakni Nilai Omset Koperasi dan Nilai Omset UKM Usaha Mikro. Nilai Omset Koperasi dihitung dengan menjumlahkan seluruh omset koperasi binaan. Realisasi indicator ini sebesar Rp 397.206.633.350. dengan demikian, tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,01 %. Sedangkan indikator Nilai Omset UKM Usaha Mikro dihitung dengan cara menjumlahkan omset UKM binaan pada tahun 2024. Realisasi indicator ini adalah 5.863.115.800, dengan demikian tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,79 %.
- b. Sasaran 2, kinerja sektor industri meningkat memiliki dua indikator kinerja yakni Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja IKM pada tahun 2024 adalah 18.821 orang. Tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 100,55 %. Sedangkan indikator kinerja Nilai Investasi IKM membukukan realisasi sebesar Rp 140.000.000.000. Dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar 106,92 %.
- c. Sasaran 3, reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu indikator yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Realisasi indicator tersebut pada tahun 2024 adalah A, dengan demikian tingkat capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah Rp 18.110.847.993.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	
1.2 Fungsi dan Tugas	
1.3 Isu-Isu Strategis	
1.4 Keadaan Pegawai	
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	
1.6 Keuangan	
1.7 Sistematika LKJIP	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	
2.3.1 Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	
3.4. Akuntabilitas Anggaran	
3.5. Inovasi	
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Daftar Tabel

- 
- Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jabatan
- Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan
- Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan
- Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
- Tabel 1.5. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta TA 2024
- Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2023 – 2026
- Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
- Tabel 2.3. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
- Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 2.6. Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta APBD Murni dan Perubahan Tahun 2024
- Tabel 2.7. Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024
- Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2. Capaian Kinerja IKU Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024
- Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
- Tabel 3.4. Metadata Indikator Program Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
- Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024
- Tabel 3.6. Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Akhir
- Tabel 3.7. Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dengan Indikator Kinerja Nasional, DIY dan Kabupaten Kulon Progo
- Tabel 3.8. Perbandingan Indikator Kinerja Pemerintah Pusat dan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
- Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024
- Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Tahun 2024
- Tabel 3.11. Analisis Efisiensi
- Tabel 3.12. Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024
- Tabel 3.13. Implementasi Kebijakan/Program/Kegiatan Tentang Bantuan Usaha dan / atau Membangun Hubungan Kemitraan Bagi Perempuan Kepala Keluarga untuk Berwirausaha
- Tabel 3.14. Inventarisasi Peran Lintas Sektor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024

Daftar Gambar



Gambar.1.1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Gambar.1.2. Susunan Organisasi UPT Logam

Gambar 1.3. Penyerahan Sertifikat Kepada IKM yang Menjadi Bagian dari Rantai Pasok Industri besar

Gambar 1.4. Perangkat Dies yang dibuat oleh IKM untuk memenuhi Pesanan dari Inggris

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Yogyakarta.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

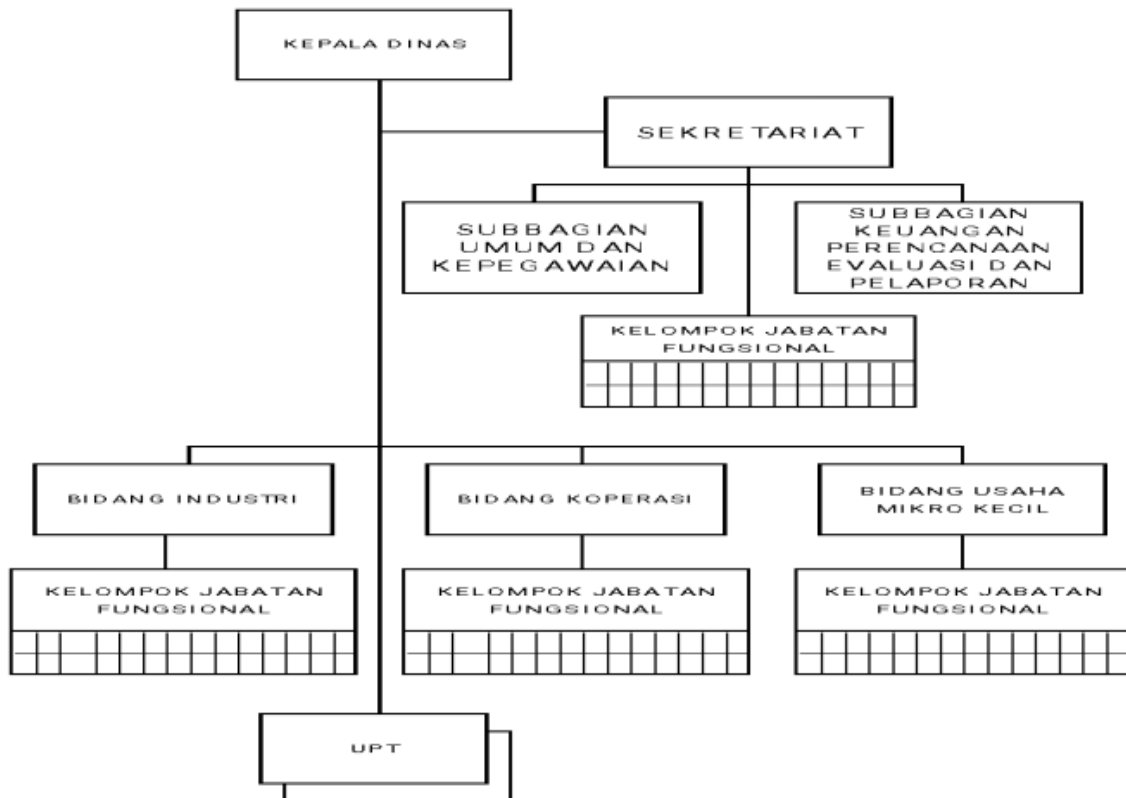
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis, yakni UPT Logam. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, UPT Logam memiliki tugas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industry logam dan PDIN (Pusat Desain Industri Nasional). Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Logam menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan petunjuk teknis pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industry logam dan desain industry;
2. Pelaksanaan riset, pembinaan, pelayanan dan fasilitasi teknis di bidang desain industry dan industry logam;
3. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan pemenuhan rantai pasok industry nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang industry manufaktur, pengembangan desain industry;
4. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas dan UPT diatas, disusunlah struktur organisasi dinas dan UPT Logam sebagaimana bagan dibawah ini :

Gambar.1.1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

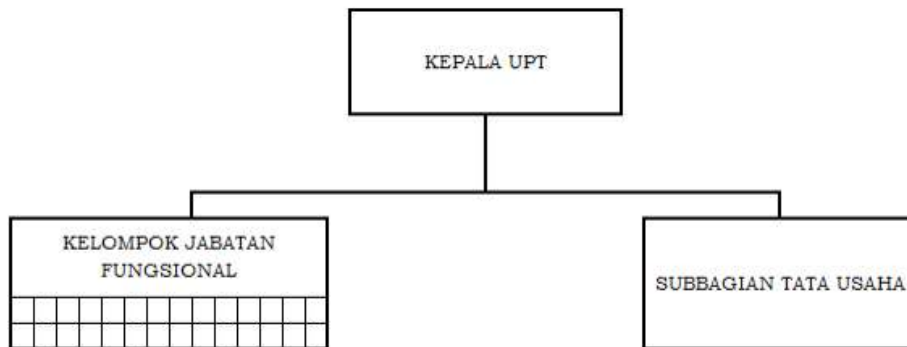


Sumber : Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

A

Gambar.1.2. Susunan Organisasi UPT Logam

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LOGAM KELAS A



1.4. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) yang telah dibentuk sejak 2017. KKS berfungsi sebagai ruang/ tempat yang dapat diakses oleh masyarakat untuk berkomunikasi, konsultasi, mendapatkan informasi, penyampaian pengaduan dan keluhan dari masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi yang membutuhkan bimbingan, fasilitasi dan mediasi terkait kelembagaan, usaha koperasi, keuangan dan pelayanan pada anggota koperasi;
- b. Reorientasi koperasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas koperasi dengan penumbuhan Gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online dengan membangun koperasi berbasis IT, serta penguatan kelembagaan koperasi;
- c. Optimalisasi peran Dekranas Daerah dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta;
- d. Digitalisasi UMKM sebagai salah satu upaya mengembangkan UMKM sesuai dengan perkembangan zaman;
- e. Sosialisasi dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha UMKM dan IKM;

- f. Memperkuat Kerjasama dan kapasitas produksi UPT Logam;
- g. Menginisiasi dan mengembangkan wisata edukasi industry di UPT Logam;
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan IKM.

1.5. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, terbagi atas 29 orang PNS dan 3 orang PPPK. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah berdasarkan jabatan struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ditunjukkan tabel 1.1 dan gambar Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta adalah JFU sebanyak 13 orang (40%), Eselon IV sebanyak 4 orang (12%), JFT sebanyak 11 orang (34%), dan Eselon III sebanyak 3 orang (9%), dan Eselon II sebanyak 1 orang (3%).

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jabatan

Uraian	JFU	JFT	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
Sekretariat	7	0	1	1	2	11
Bidang Koperasi	1	3	0	1	0	5
Bidang Usaha Mikro	1	2	0	1	0	4
Bidang Industri	0	6	0	0	0	6
UPT Logam	4	0	0	0	2	6
Jumlah	13	11	1	3	4	32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2024

Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan golongan. Berdasarkan kelas jabatannya, PPPK setara dengan PNS golongan III. Oleh karenanya dalam komposisi dimasukkan kedalam golongan III. Sebagian besar pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berada digolongan III, yaitu sebanyak 19 orang (59%), diikuti golongan II sebanyak 7 orang (21%) dan paling sedikit golongan IV sebanyak 6 orang (18%).

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
Berdasarkan Golongan

Uraian	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Sekretariat	0	4	4	3	11
Bidang Koperasi	0	0	3	2	5
Bidang Usaha Mikro	0	1	2	1	4
Bidang Industri	0	0	6	0	6
UPT Logam	0	2	4	0	6
Jumlah	0	7	19	6	32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2024

Berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3. Hampir separuh pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah lulusan sarjana (S1), yaitu 16 orang (47%), diikuti lulusan pasca sarjana (S2) sebanyak 8 orang (23%) dan D-III masing-masing 7 orang (21%), dan SLTA sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SLTP	SLTA	D-3	S1	S2	
Sekretariat	0	1	4	3	3	11
Bidang Koperasi	0	0	1	2	2	5
Bidang Usaha Mikro	0	1	0	1	2	4
Bidang Industri	0	0	0	6	0	6
UPT Logam	0	0	2	4	0	6
Jumlah	0	2	7	16	7	32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2024

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana prasarana Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta cukup memadai, terutama sarana prasarana pokok seperti meja kerja, komputer dan jaringan internet,. Sarana dan prasarana yang tersedia di tiga unit bangunan kantor yakni Dinas, UPT Logam dan PDIN.

Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Semua komputer dan Laptop tersambung jaringan internet. Tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 4 bagi Kepala Dinas dan semua pejabat eselon III (sekretaris dan kepala bidang). Untuk pejabat eselon IV, tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 2 per orang. Secara rinci sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tersaji pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Lokasi
1	A.C. Split	10	DPKU
2	A.C. Split	10	UPT LOGAM
3	Adjustable Wrench 6 (Kunci Inggris)	1	UPT LOGAM
4	ADV cnc router	1	UPT LOGAM
5	Air Compresor	4	UPT LOGAM
6	Air orbital palm sander	5	UPT LOGAM
7	Airbrush kit	10	UPT LOGAM
8	ALAT DAPUR	3	DPKU
9	ALAT PENDINGIN	1	DPKU
10	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	DPKU

11	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	4	DPKU
12	ALAT UKUR/PEMBANDING	15	UPT LOGAM
13	Bak Air	1	DPKU
14	Bak Celup	3	UPT LOGAM
15	Band saw	1	UPT LOGAM
16	Bangku Tunggu	1	DPKU
17	Batch Vacuum Filter	1	UPT LOGAM
18	Blok Simetri Putar	1	UPT LOGAM
19	Brandkas	2	DPKU
20	Brandkas	1	UPT LOGAM
21	Camera Electronic	1	DPKU
22	Capacity Die Casting	63	UPT LOGAM
23	CCTV	1	UPT LOGAM
24	Chisel mortisel	1	UPT LOGAM
25	Clipp On	1	DPKU
26	Cnc	13	UPT LOGAM
27	Cnc - Lathe	2	UPT LOGAM
28	CNC Laser Wood Carving	1	UPT LOGAM
29	Cnc Milling Machine	174	UPT LOGAM
30	Complete mechanic tool set	51	UPT LOGAM
31	Compressed Natural Gas (CNG) Conversion Kit	11	UPT LOGAM
32	Converntion Lathe	3	UPT LOGAM
33	Cut off machine	3	UPT LOGAM
34	Dial & Test Indikator	1	UPT LOGAM
35	Dial & Test Indikator	2	UPT LOGAM
36	Dispenser	2	DPKU

37	Dry Cabinet Box Camera (Dry Box Kamera)	1	UPT LOGAM
38	Drying Booth	1	UPT LOGAM
39	Electric pipe bender machine	2	UPT LOGAM
40	Electrical Discharge	1	UPT LOGAM
41	Electrostatic powder coating	1	UPT LOGAM
42	English whell manual	2	UPT LOGAM
43	Face Shield (From Radiant Heat Spork)	4	UPT LOGAM
44	Facsimile	1	DPKU
45	Filing Cabinet Besi	23	DPKU
46	Filing Cabinet Besi	4	UPT LOGAM
47	Finger joint laminated	1	UPT LOGAM
48	Floor Crane	1	UPT LOGAM
49	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	UPT LOGAM
50	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	DPKU
51	Forklift	1	UPT LOGAM
52	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	DPKU
53	Gergaji	4	UPT LOGAM
54	Glossmeter	4	UPT LOGAM
55	Ground Parallels VP-128A (Paralel Block)	2	UPT LOGAM
56	Hand pallet	2	UPT LOGAM
57	High pressure cleaner	8	UPT LOGAM
58	Holder	2	UPT LOGAM
59	Jam Elektronik	3	DPKU
60	Jewellery work station	11	UPT LOGAM
61	Jig saw	5	UPT LOGAM
62	Ketam	1	UPT LOGAM

63	Kipas Angin	1	DPKU
64	Komputer CAD/CAE	4	UPT LOGAM
65	Kunci Pas	3	UPT LOGAM
66	Kursi Besi/Metal	28	UPT LOGAM
67	Kursi Kayu	6	DPKU
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	DPKU
69	Kursi Lipat	18	DPKU
70	Kursi Putar	20	DPKU
71	Kursi Putar	88	UPT LOGAM
72	Kursi Rapat	82	DPKU
73	Kursi Rapat	36	UPT LOGAM
74	Kursi Tamu	4	DPKU
75	Lap Top	2	DPKU
76	Lap Top	11	UPT LOGAM
77	Laser Cutting Grafir	1	UPT LOGAM
78	Lathe machine	4	UPT LOGAM
79	LCD Projector/Infocus	1	DPKU
80	LCD Projector/Infocus	2	UPT LOGAM
81	Lemari Besi/Metal	17	DPKU
82	Lemari Besi/Metal	5	UPT LOGAM
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	DPKU
84	Lemari Es	3	DPKU
85	Lemari Kayu	3	DPKU
86	Lemari Kayu	30	UPT LOGAM
87	Lemari Kayu	2	UPT LOGAM
88	Lemari Penyimpan	3	UPT LOGAM

89	Lemari Sorok	1	UPT LOGAM
90	Magnetic Particle (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2	UPT LOGAM
91	Meja 1/2 Biro	39	DPKU
92	Meja 1/2 Biro	15	UPT LOGAM
93	Meja Kerja Besi/Metal	4	DPKU
94	Meja Kerja Besi/Metal	22	UPT LOGAM
95	Meja Kerja Kayu	98	UPT LOGAM
96	Meja Komputer	6	DPKU
97	Meja Komputer	2	UPT LOGAM
98	Meja Rapat	30	DPKU
99	Meja Rapat	12	UPT LOGAM
100	Meja Resepsionis	1	UPT LOGAM
101	Mesin Amplas Plat	1	UPT LOGAM
102	Mesin Bor	3	UPT LOGAM
103	Mesin Bor Tangan	4	UPT LOGAM
104	Mesin Bubut	109	UPT LOGAM
105	Mesin Bubut	4	UPT LOGAM
106	Mesin CNC	1	UPT LOGAM
107	Mesin Gerinda	2	UPT LOGAM
108	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	2	UPT LOGAM
109	Mesin Gerinda Tangan	1	UPT LOGAM
110	Mesin Gerinda Tangan	1	UPT LOGAM
111	Mesin Kompresor	3	UPT LOGAM
112	Mesin Las Listrik	4	UPT LOGAM
113	Mesin laser cutting	2	UPT LOGAM
114	Mesin Meiling	1	UPT LOGAM

115	Mesin Pembengkok Uni	2	UPT LOGAM
116	Mesin Pemotong Plat	1	UPT LOGAM
117	Mesin Perapen	1	UPT LOGAM
118	Mesin Press Hidrolik & Punch	4	UPT LOGAM
119	Mesin Skrup	1	UPT LOGAM
120	MEUBELAIR	3	DPKU
121	MEUBELAIR	4	UPT LOGAM
122	Mig weld	4	UPT LOGAM
123	Milling Machine (Mechanical Proses)	25	UPT LOGAM
124	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	UPT LOGAM
125	Mini lathe	2	UPT LOGAM
126	Mitre saw	4	UPT LOGAM
127	Note Book	11	DPKU
128	P.C Unit	20	DPKU
129	P.C Unit	69	UPT LOGAM
130	Palm sander	4	UPT LOGAM
131	Papan Nama Instansi	1	UPT LOGAM
132	Papan Tulis	2	UPT LOGAM
133	Papan Visual/Papan Nama	1	DPKU
134	Pararel Bar	2	UPT LOGAM
135	Paron	2	UPT LOGAM
136	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3	DPKU
137	Peralatan Las Listrik	5	UPT LOGAM
138	PERALATAN TUKANG BESI	1	UPT LOGAM
139	Perkakas Bangku Kerja	3	UPT LOGAM
140	Perkakas Bengkel Kayu lainnya	1	UPT LOGAM

141	PERKAKAS BENGKEL KERJA	1	UPT LOGAM
142	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	3	UPT LOGAM
143	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERP	8	UPT LOGAM
144	Perkakas Pemotong Plat	2	UPT LOGAM
145	Perkakas Pengecoran Logam	9	UPT LOGAM
146	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	UPT LOGAM
147	Perlengkapan Bengkel Kayu	1	UPT LOGAM
148	Perlengkapan Bengkel Mekanik	4	UPT LOGAM
149	Pesawat Telephone	6	DPKU
150	Pick Up	1	UPT LOGAM
151	planer thicknesser	1	UPT LOGAM
152	Plasma cut	2	UPT LOGAM
153	Platting machine	4	UPT LOGAM
154	Polishing Machine/Mesin Poles	1	UPT LOGAM
155	Pompa Air	3	DPKU
156	Portable colorimeter	5	UPT LOGAM
157	Portable Compressor	4	UPT LOGAM
158	Portable Generating Set	1	UPT LOGAM
159	Powder press machine	1	UPT LOGAM
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	DPKU
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	UPT LOGAM
162	Rak Besi	5	DPKU
163	Rak Besi	18	UPT LOGAM
164	Rak Kayu	9	UPT LOGAM
165	Rak Kayu	5	DPKU
166	Rotary Filling	2	UPT LOGAM

167	Router	1	DPKU
168	Sand blasting machine	1	UPT LOGAM
169	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	UPT LOGAM
170	Sepeda Motor	2	UPT LOGAM
171	Sepeda Motor	15	DPKU
172	Set Moulding	1	UPT LOGAM
173	Sice	9	DPKU
174	Sice	1	UPT LOGAM
175	Site table saw	2	UPT LOGAM
176	Slide Projector (Lapangan)	1	DPKU
177	Sofa	1	DPKU
178	Sound System	2	DPKU
179	Spindle moulder	1	UPT LOGAM
180	Spray booth portable airbrush	2	UPT LOGAM
181	Spray booth portable Besar	3	UPT LOGAM
182	Spray gun finer core	10	UPT LOGAM
183	Stabilisator	1	UPT LOGAM
184	stacker electric	1	UPT LOGAM
185	Station Wagon	6	DPKU
186	Stationary Generating Set	1	DPKU
187	Switch Hub	1	DPKU
188	T R I P O D	3	UPT LOGAM
189	Tablet spray	10	UPT LOGAM
190	Tang Ampere	1	UPT LOGAM
191	Tangga Aluminium	3	DPKU
192	Tanggem	6	UPT LOGAM

193	Tanggem	1	UPT LOGAM
194	Televisi	4	DPKU
195	Tempat Tidur Kayu	30	UPT LOGAM
196	Tig weld	5	UPT LOGAM
197	Tilting Tester	1	UPT LOGAM
198	Tool Cabinet Set	7	UPT LOGAM
199	Tool Kit Box	1	UPT LOGAM
200	Tool Kit Set	3	UPT LOGAM
201	Truck + Attachment	1	UPT LOGAM
202	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Prose	1	UPT LOGAM
203	UV lighting for finishing	1	UPT LOGAM
204	Vacuum press for veener	1	UPT LOGAM
205	Venier Caliver	2	UPT LOGAM
206	Vernier Caliper	1	UPT LOGAM
207	Wheel Crane	1	UPT LOGAM
208	White Board	4	DPKU
209	White Board	2	UPT LOGAM
210	Wireless	2	DPKU
211	Wood copy lathe	2	UPT LOGAM
212	Wood planner	2	UPT LOGAM
213	Wood press machine 3 layer	1	UPT LOGAM

Sumber: Daftar Inventaris SIM Aset Tahun 2024

1.7. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18.110.847.993,- (anggaran perubahan) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 17.871.415.913,- dan belanja modal sebesar Rp 239.432.800,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel 1.5.

Tabel 1.5

Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta TA 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
BELANJA DAERAH	18.110.847.993
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.256.681.723
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.015.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.511.638.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.216.565
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.562.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.121.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.898.500
Peningkatan Pelayanan BLUD	750.730.158
II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	198.013.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	198.013.000
III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	78.509,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.509,000
IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	457.887.400
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.887.400
V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	474.788.500
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	474.788.500
VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	590.146.500
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	590.146.500
VII. Program Pengembangan UMKM	1.364.639.820
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.364.639.820
VIII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.615.978.050
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	7.615.978.050
IX. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	21.127.500

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	21.127.500
IX.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	53.076.500
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	53.076.500

Sumber Data : Sub Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2024

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional **(jika ada)**;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
 8. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender yang menasar 5 kelompok rentan, yaitu: fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia;
 9. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja;
 10. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja;
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB 2



Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Pada tahap yang lebih operasional RPD menjadi pedoman penyusunan rencana tahunan (RKPD dan Renja OPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD).

Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahunan. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM yang mengacu pada tugas dan fungsinya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Dokumen ini merupakan manifestasi komitmen Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melaksanakan reviu Renstra pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan melaksanakan mekanisme perubahan APBD. Pada dasarnya perubahan anggaran mengubah sebagian target kinerja level sasaran, program dan pada tataran target kinerja output pada sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 yang tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	Meningkatnya kualitas pariwisata	Meningkatnya kualitas pariwisata	
	3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	

	bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum		
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan dama	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah :

- Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran angka pertumbuhan ekonomi, melalui pendampingan izin usaha mikro (IUM) dan izin usaha industri, kemitraan dan pembiayaan, penumbuhan wirausaha baru, publikasi dan promosi UMKM, pelatihan dan pendampingan bagi IKM dan UKM, pemantauan penerapan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota, pendataan IKM (Industri Kecil Menengah), pembinaan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembinaan kelompok UKM kuliner peserta program Gandeng Gendong dan Kelompok Nglarisi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta mendukung terwujudnya misi Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa pada sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan misi tersebut maka ditentukan sasaran strategis Perangkat Daerah. Secara rinci sasaran strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	368.330.174.952	369.330.174.952	370.330.174.952	371.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.040.000.000	5.760.000.000	6.480.000.000	7.200.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	16.425	18.718	21.012	23.305
		Nilai Investasi IKM	Rp	15.948.506.955	19.165.867.834	22.383.228.713	25.600.589.592
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A
Perbaikan Kinerja 2024							
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	368.330.174.952	397.157.422.559	397.257.422.559	397.357.422.559
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.040.000.000	5.760.000.000	6.480.000.000	7.200.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	16.425	18.718	21.012	23.305
		Nilai Investasi IKM	Rp	15.948.506.955	130.935.000.000	132.899.025.000	134.892.510.375
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A

	Usaha Kecil dan Menengah						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Metadata Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta 2023 – 2026

Tahun 2024 dilakukan revidi perbaikan kinerja yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024. Perbaikan kinerja dilakukan pada penentuan target sasaran tahunan. Revidi ini dilakukan mengingat adanya dinamika yang dihadapi. Misalnya pada sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Anggota, pada indikator kinerja Nilai Omset Koperasi. Target kinerja tahun 2024 hingga 2026 diperbaharui mengingat realisasi pada tahun 2023 sudah cukup tinggi, yakni Rp 397.157.422.559 . Oleh karenanya target kinerja perlu diubah agar lebih relevan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, target kinerja pada indikator Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 397.157.422.559. Target kinerja tersebut sama dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan adanya tren perpindahan binaan, dimana koperasi yang semula merupakan binaan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta berpindah menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY atau Kementerian Koperasi. Sasaran Meningkatnya Kinerja sektor industry pada indikator kinerja Nilai Investasi IKM juga mengalami perbaikan. Semula, target indikator tersebut untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 19.165.867.834, berubah menjadi Rp 130.935.000.000.

2.1.3.Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melaksanakan 10 nomenklatur program, 18 kegiatan, dan 37 sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	2	3	4	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

			Daerah Kabupaten/Kota	
		4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	6. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
	7. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
		6. Program Pengembangan UMKM	6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	9. Program Perencanaan dan	7. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	9. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

		Pembangunan Industri	Industri Kabupaten Kota	10. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industr
				11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				12. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPT Logam)
		13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	14. Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem

				Informasi Industri Nasional (SIINas)
		10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10. Peningkatan Pelayanan BLUD	15. Pelayanan dan Penunjang BLUD
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				17. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				18. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
				19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			21. Pelaksanaan Penatausahaan dan	
			22. Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
13. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan			

				Barang Milik Daerah SKPD
				25. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			15. Administrasi Umum Perangkat Daerah	27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				28. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				29. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				37. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : DPA dan DPPA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja memperhatikan RPJMD/RPD, Renstra, indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama dan dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran perangkat daerah. Tahun 2024, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta menyusun Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II, Administrator setara eselon III dan Pengawas setara eselon IV.

Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan dan anggaran. Perjanjian Kinerja eselon IV memuat sub kegiatan, indikator sub kegiatan, target output dan

anggaran. Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	369.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.760.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	18.718
		Nilai Investasi IKM	Rp	19.165.867.834
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta secara rinci tersaji pada Tabel 2.5. Penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada reviu perbaikan kinerja.

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	397.157.422.559
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.760.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	18.718
		Nilai Investasi IKM	Rp	130.935.000.000

3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A
---	--	---	-------	---

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, sehingga diketahui sejauh mana capaian kinerja yang telah direalisasikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja murni sebesar Rp 17.603.306.835 dan anggaran pendapatan sebesar Rp 490.500.000. Anggaran tersebut mengalami perubahan melalui

mekanisme perubahan APBD 2024, anggaran belanja menjadi Rp 18.110.847.993 dan anggaran pendapatan menjadi Rp 750.730.158. Terdapat peningkatan pada kelompok belanja daerah maupun pendapatan. Peningkatan anggaran pendapatan disebabkan PDIN mulai aktif beroperasi dimana ruangan-ruangan didalamnya dapat disewakan kepada pihak luar.

2.3.1. Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran belanja melalui APBD Murni sebesar Rp 17.603.306.835 dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp 17.184.908.035 dan belanja modal sebesar Rp 418.398.800. Pada APBD Perubahan 2024, alokasi keseluruhan mengalami peningkatan menjadi Rp 18.110.847.993. Alokasi belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp 239.432.000. Sedangkan alokasi belanja operasi naik menjadi Rp 17.871.415.193.

Tabel 2.6

**Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Yogyakarta APBD Murni dan Perubahan Tahun 2024**

Uraian	Target Murni	Target Perubahan
Belanja Operasi	17.184.908.035	17.871.415.193
Belanja Modal	418.398.800	239.432.000
Jumlah	17.603.306.835	18.110.847.993

Sumber : DPA dan DPPA Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Total Anggaran belanja daerah Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis. Alokasi sebesar Rp 2.610.817.345 digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat melalui APBD Murni sedangkan pada APBD Perubahan alokasi tersebut meningkat menjadi Rp 3.163.984.220. Alokasi dari APBD Murni sebesar Rp 8.422.481.850 digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja sector perindustrian meningkat, pada APBD Perubahan alokasi tersebut naik menjadi Rp 8.440.912.208. Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.570.007.640 pada APBD Murni dan Rp 6.505.951.565 pada APBD Perubahan.

Tabel 2.7

Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Sasaran	Anggaran Murni	Persentase Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Persentase Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	2.610.817.345	14,83 %	3.163.984.220	17,47 %	Bidang Koperasi dan Bidang UKM Terdiri dari 6 program
2	Kinerja sektor perindustrian meningkat	8.422.481.850	47,85 %	8.440.912.208	46,61 %	Bidang Industri dan UPT Logam Terdiri dari 3 program
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6.570.007.640	37,32 %	6.505.951.565	35,92 %	Sekretariat terdiri dari 1 program
Jumlah		17.603.306.835	100,00	18.110.847.993	100,00	

Sumber : DPA dan DPPA Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta 2024

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target dan capaian realisasinya pada tahun 2024 .

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi, yakni semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan rumus diatas, berlaku untuk semua indikator kinerja. Hal itu dikarenakan sifat ketiga indikator kinerja sama yakni semakin tinggi realisasi semakin baik capaian kerjanya.

Pengukuran capaian kinerja dari setiap sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tertuang pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja IKU Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
				MURNI	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	369.330.174.952	397.157.422.559	397.206.633.350	100,01 %	Sangat Baik
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.760.000.000	5.760.000.000	5.863.115.800	101,79 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	18.718	18.718	18.821	100,55 %	Sangat Baik
		Nilai Investasi IKM	Rp	19.165.867.834	130.935.000.000	140.000.000.000*	106,92 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	100 %	Sangat Baik

Sumber : Desk Timbal Balik Tribulan IV TA 2024

*Data yang digunakan adalah data proyeksi

Tabel 3.3.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	Nilai omset koperasi	Nilai omset koperasi yang dibina tahun n
		Nilai omset UKM Usaha Mikro	Nilai Omset UKM Usaha Mikro yang dibina tahun n
2	Kinerja Sektor Perindustrian Meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Rekapitulasi tenaga kerja IKM yang dibina
		Nilai Investasi IKM	Nilai investasi IKM yang dibina tahun n
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Sumber : Metadata Renstra

Dari Tabel 3.2 diketahui bahwa semua target tercapai 100 % bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 termasuk kriteria “sangat tinggi”. Sebagai usaha untuk mencapai target kinerja, dilaksanakan sejumlah upaya. Masing-masing indikator sasaran didukung oleh pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM memiliki dua indikator kinerja yakni Nilai Omset Koperasi dan Nilai Omset UKM Usaha Mikro. Target kinerja indikator Nilai Omset Koperasi adalah Rp 369.330.174.952 pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024. Target tersebut diubah menjadi Rp 397.157.422.559 pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi atas target tersebut sebesar Rp 397.206.633.350. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 100,01 %. Indikator kinerja Nilai Omset Koperasi diwujudkan melalui pelaksanaan empat program kerja, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Indikator kinerja sasaran Nilai Omset UKM Usaha Mikro, target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar Rp 5.760.000.000 dan tidak ada perubahan pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Realisasi

indikator ini pada tahun 2024 sebesar Rp 5.863.115.800. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 101,79%. Capaian tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan dua program kerja yakni, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM terdiri dari satu kegiatan, yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program Pengembangan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri memiliki dua indikator kinerja antara lain Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Target indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM ditetapkan sebesar 18.718 orang dan terealisasi sebesar 18.821 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,55 %. Sedangkan target indikator Nilai Investasi IKM semula ditetapkan sebesar Rp 19.165.867.834, kemudian diubah menjadi Rp 130.935.000.000 pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Realisasi atas target tersebut sebesar Rp 140.000.000.000. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah 106,92%.

Untuk mewujudkan target sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, dilaksanakan empat program kerja antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan

Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)..

Terdapat satu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri. Kegiatan itu adalah Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu indikator kinerja yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target yang ditetapkan adalah nilai A. Realisasi indikator ini adalah A. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100 %.

Untuk mencapai indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari delapan kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terdiri atas empat sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari dua sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Kegiatan Administrasi Kepegawaian terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari empat sub kegiatan, meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satusub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 3.4

Metadata Indikator Program Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Program PD (Program berdasarkan Keppmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2024		2025	2026
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Target Program PD
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	unit	115	115	115	115
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n	unit	115	115	115	115
PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Jumlah SDM Koperasi yang	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	orang	690	690	765	840

LATIHAN PERKOPERASIAN	mempunyai kompetensi						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	unit	27	27	33	39
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	UKM	100	115	100	100
	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	UKM	400	400	400	400
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	UKM	40	40	45	50
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	6,9	10,17	7,63	8,30
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	1,8	61,87	2,1	2,4
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	%	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pendapatan UPT logam	Pendapatan UPT logam tahun n	Rp	490.500.000	566.776.486	500.000.000	530.000.000
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A	A

	Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
--	--	--	--	--	--	--	--

*adalah data capaian tahun sebelumnya karena hasil penilaian tahun 2023 belum final.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran program Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Akuntabilitas baik yang dimaksud adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Tahun 2024 target indikator kinerja ini adalah 115 unit koperasi. Realisasi target kinerja jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian capaian kinerja target ini mencapai 100 %.
- Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- a) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Pada tahun 2024 dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi kepada 156 koperasi.
 - b) Klinik Koperasi Sehat, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan kompetitif.
 - c) Melaksanakan Pemeringkatan Koperasi. Pemeringkatan Koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pemeringkatan koperasi memberikan nilai dan pengelompokan koperasi menjadi koperasi berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Tahun 2024 dilakukan pemeringkatan koperasi bagi 50 koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu target kinerja yakni jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat. Formula penghitungannya adalah jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n (tahun berjalan). Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 yakni 115 unit koperasi. Sedangkan realisasinya sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target kinerja program ini dilaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Melalui aktivitas ini, permasalahan yang dihadapi koperasi juga dapat dideteksi. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian koperasi antara lain prinsip perkoperasian, legalitas lembaga dan manajemen. Prinsip perkoperasian meliputi tata Kelola koperasi, kecukupan permodalan, pengelolaan permodalan, profil resiko. Legalitas lembaga meliputi legalitas badan hukum, legalitas izin usaha, keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Sedangkan aspek manajemen mencakup Manajemen Umum, Manajemen Kelembagan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas.

Aktivitas penilaian Kesehatan koperasi ini menyasar 115 koperasi. Dengan dilaksanakannya Penilaian Kesehatan Koperasi diharapkan koperasi di masa depan mampu memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun n (tahun berjalan). Tahun 2024 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 690 orang. Sedangkan realisasinya sebesar 690 orang. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Aktivitas yang dilakukan antara lain :

- a) Bimbingan Teknis Perkoperasian
- b) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
- c) Diklat sertifikasi dan uji kompetensi
- d) Pendampingan pasca diklat

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat. Tahun 2024 target indikator kinerja ini ditetapkan

sebesar 27 unit dan terealisasi sebesar 27 unit. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

- a) Melaksanakan pameran produk-produk koperasi. Pada tahun 2024 dilakukan Gelar Potensi Koperasi pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi Kota Yogyakarta, turut serta sebagai peserta pameran pada Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional dan Pameran Smaradahana pada bulan Desember.
 - b) Pembinaan kelompok Pra Koperasi.
 - c) Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2024 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
 - d) Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2024 telah dilaksanakan Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan pameran.
 - e) Pembuatan iklan layanan masyarakat tentang koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan Jumlah UKM ber-NIB.

Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

Jumlah UKM ber-NIB, formula penghitungan indikatornya adalah Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 400 UMKM dan terealisasi sebesar 400 UMKM. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan memiliki tiga sub

kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

- a) Melakukan updating data UMKM
- b) Fasilitasi Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)
- c) Pelatihan dan Pendampingan Home Business Camp (HBC), merupakan kegiatan komprehensif bagi pelaku usaha yang berusia antara 18 – 28 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024 kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta.
- d) Pelatihan dan Pendampingan Karang Mitra Usaha (KaMU), merupakan kegiatan komprehensif bagi pelaku usaha yang berusia 28 tahun keatas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas maupun omzet penjualan UMKM. Pada tahun 2024 kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta.
- e) Pembuatan program televisi
- f) Fasilitasi tempat promosi bagi peserta pelatihan HBC dan KaMU

6. Program pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah UKM Mandiri. Formula penghitungannya adalah Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 40 UMKM dan terealisasi 40 UMKM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dan memiliki satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

- a) Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Pemasaran Serta Pengembangan UKM, kegiatan ini diikuti 30 orang peserta.
- b) Peningkatan Orientasi Usaha Mikro melalui Layanan Produk, dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti 30 orang peserta.

- c) Pembinaan E-Nglarisi melalui Kelompok Gandeng Gendong. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dan setiap angkatan diikuti oleh 30 orang peserta. Dengan demikian total peserta kegiatan ini sebanyak 120 orang.
- d) Fasilitasi Kemitraan, Kerjasama dan Pembiayaan.
- e) Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta.
- f) Pameran dan promosi produk UMK. Pameran yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain Gelar Pesona UKM, pameran dalam rangkaian kegiatan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), pameran dalam rangkaian peringatan Hari UMKM.
- g) Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak. Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar daerah maupun di dalam daerah melalui media.

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi. Formula penghitungan indikator ini adalah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 6,97 % dan terealisasi sebesar 10,17 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 145,90 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Sub Kegiatan Koordinansi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Pelaksanaan program ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Industri antara lain :

- a) Pendampingan kepada IKM Kerajinan
- b) Pelatihan Manajemen Usaha
- c) Pelatihan Teknis Produksi
- d) Pelatihan Diversifikasi Produk
- e) Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
- f) Fasilitasi Registrasi HKI
- g) Fasilitasi promosi
- h) Pameran produk IKM

- i) Pembuatan video profil IKM
- j) Promosi dan sosialisasi melalui program televisi
- k) Penguatan kelembagaan dan Pendampingan IKM
- l) Business Matching
- m) Penguatan P3DN

- n) Monitoring dan Evaluasi Sentra

Sedangkan upaya-upaya yang dijalankan oleh UPT Logam antara lain :

- a) Fasilitasi Pelayanan UPT Logam
- b) Fasilitasi Pelayanan PDIN
- c) Pelatihan Setter Mesin Injeksi
- d) Pendukung Layanan UPT Logam
- e) Pelatihan Manajemen Sosmed
- f) Pelatihan Desain Produk
- g) Pelatihan Pemrograman Mesin
- h) Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM
- i) Pendampingan Kemitraan
- j) Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM

8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase IKM yang berizin industry. Formula penghitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah IKM yang berizin industry dibagi total jumlah IKM dikali 100 %. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 1,8 % dan terealisasi sebesar 61,87 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 3.305, 67 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

- a) Helpdesk IKM
- b) Melakukan verifikasi teknis atas pengajuan permohonan izin usaha industri
- c) Pengawasan izin usaha industri

9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula penghitungannya adalah data

IKM yang ter-update) dibagi total Data IKM dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

- a) Updating data IKM
- b) Penyampaian informasi industry dalam SIINAS

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki dua indikator kinerja yakni yakni pendapatan UPT Logam dan nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat. Formula penghitungan indikator pendapatan UPT Logam adalah pendapatan UPT Logam tahun n (tahun berjalan). Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp 490.500.000 dan membukukan realisasi sebesar Rp 566.776.846. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 115,55 %. Sedangkan indikator nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat, target yang ditetapkan adalah A, dan terealisasi dengan nilai A. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100 %.

Dari uraian diatas diketahui bahwa dari dua belas indikator kinerja program, seluruhnya membukukan capaian kinerja yang baik. Seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target. Capaian ini menjadi modal untuk senantiasa menjaga kinerja organisasi selalu baik di masa mendatang. Disisi lain, capaian baik pada indikator kinerja sasaran dan program menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mendukung pencapaian kinerja sasaran OPD/IKU.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Membandingkan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Renstra 2023 – 2026 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta memuat sasaran yang Sebagian diantaranya berbeda dengan sasaran strategis pada periode Renstra sebelumnya, yakni

tahun 2017 – 2022. Hal ini dikarenakan target Renstra 2017 – 2022 telah terpenuhi. Sasaran baru merupakan upaya menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah RPD 2023 – 2026 Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator kinerja yang berbeda dengan periode Renstra 2017 – 2022 adalah Nilai Investasi IKM dan Jumlah Tenaga Kerja IKM. Indikator tersebut selaras dengan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota) Yogyakarta. Indikator baru ini ditetapkan karena indikator lama, yakni Nilai Oset IKM, capaiannya telah jauh melampaui target. Dengan demikian dibutuhkan indikator kinerja baru yang lebih relevan.

Bila disandingkan dengan target dan realisasi sasaran tahun sebelumnya maka capaian kinerja pada tahun 2024 dapat memenuhi target sebagaimana yang termuat dalam Tabel 3. ...

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2022 , Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai omset koperasi	406.366.988.994	336.557.181.503	82,82 %	368.330.174.952	397.157.422.559	107,80 %	397.157.422.559	397.206.633.350	100,01 %
Nilai omset UKM Usaha Mikro	6.709.320.338	6.720.239.196	100,16 %	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78 %	5.760.000.000	5.863.115.800	101,79 %
Nilai Omset IKM	248.755.928	798.139.000	320,85 %	-	-	-	-	-	-
Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	16.425	17.944	110 %	18.718	18.821	100,55 %
Nilai Investasi IKM	-	-	-	15.948.506.955	29.830.452.498	187 %	130.935.000.000	140.000.000.000*	106,92 %
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	100 %

Sumber : Metadata Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Melalui Keputusan Wali Kota Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, telah ditetapkan indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta sebagaimana termuat pada tabel diatas. Terdapat tiga indikator kinerja tahun 2024 yang dapat dibandingkan dengan tahun tahun 2023 dan 2022, yakni Nilai omset koperasi; Nilai omset UKM Usaha Mikro dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Sedangkan indikator Nilai Investasi IKM dan indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM dapat

dibandingkan dengan tahun 2023 namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Karena merupakan indikator yang baru berlaku pada tahun 2023.

Indikator sasaran Nilai Omset Koperasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 397.206.633.350. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 397.157.422.559. Capaian tersebut merupakan capaian yang istimewa mengingat pemberlakuan regulasi perkoperasian yang berdampak pada berpindahannya koperasi-koperasi binaan Kota Yogyakarta menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berpotensi menggerus capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta.

Indikator sasaran Nilai omset UKM Usaha Mikro pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 5.863.115.800. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, realisasi tersebut lebih tinggi. Realisasi Nilai omset UKM Usaha Mikro pada tahun 2023 sebesar Rp 5.583.232.560. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2022, maka realisasi tahun 2024 lebih rendah. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 6.720.239.196. Meski demikian, realisasi pada tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, yakni sebesar Rp 5.760.000.000.

Indikator sasaran Jumlah Tenaga Kerja IKM pada tahun 2024 sebesar 18.821 orang. Realisasi ini lebih tinggi, dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja IKM pada tahun 2023, yakni 17.944 orang. Sedangkan indikator sasaran Nilai Investasi IKM pada tahun 2024 sebesar Rp 140.000.000.000. Realisasi tersebut lebih tinggi disbanding realisasi pada tahun 2023 yakni Rp 29.830.452.498.

Indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai A. Realisasi tersebut sama dengan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Capaian-capaian kinerja diatas menunjukkan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta selama bertahun-tahun telah berada pada jalur yang benar sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku dan berorientasi pada perbaikan kinerja.

3.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6

Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Akhir

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Nilai omset koperasi	397.157.422.559	397.206.633.350	371.330.174.952	106 %	

Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.583.232.560	5.863.115.800	7.200.000.000	81 %	
Jumlah Tenaga Kerja IKM	17.944	18.821	23.305	80 %	
Nilai Investasi IKM	29.830.452.498	140.000.000.000*	25.600.589.592	546 %	
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	50 %	Dikarenakan periode perencanaan berlaku empat tahun dan target sama pada setiap tahunnya, maka penghitungan prosentase capaian juga dibagi empat

Sumber : Metadata Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan tahun 2023 – 2026. Berdasarkan realisasi indikator sasaran tahun 2024 dan target pada akhir tahun 2026, sebagian diantaranya telah melampaui target tahun 2026 dan Sebagian lainnya mendekati target tahun 2026. Indikator kinerja sasaran yang telah melampaui target akhir periode perencanaan adalah Nilai Omset Koperasi dan Nilai Investasi IKM. Untuk kedua indikator tersebut dapat dilakukan penetapan target ulang agar lebih relevan. Sedangkan tiga indikator kinerja sasaran yang capaiannya mendekati target akhir periode perencanaan, yakni Nilai Omset UKM Usaha Mikro, Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Dengan memperhatikan tren capaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya, maka target indikator tersebut pada tahun 2026 optimis dapat terpenuhi. Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan dapat terus dilanjutkan dengan perluasan sasaran penerima manfaat agar dapat meraih target tersebut.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta maka dilakukan pembandingan dengan indikator kinerja pada instansi pengampu urusan yang sama pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang setara. Agar dapat dibandingkan maka perlu dicari indikator kinerja yang sejenis. Oleh karenanya, indikator yang dibandingkan adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) khususnya pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan industri.

Tabel 3.7
Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dengan
Indikator Kinerja Nasional, DIY dan Kabupaten Kulon Progo

No	Urusan	Indikator Kinerja	Formula Penghitungan	Realisasi Kota Yogyakarta	Realisasi Kabupaten Kulon Progo	Realisasi Provinsi DIY
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	12 = ----- x 100% 32 = 38 %	0 = ----- x 100% 0 = 0 %	-
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	156 = ----- x 100% 347 = 44,96 %	16 = ----- x 100% 284 = 5,63 %	130 = ----- x 100% 324 = 40,12 %
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	131 = ----- x 100% 258 = 50 %	128 = ----- x 100% 239 = 53,65 %	113 = ----- x 100% 212 = 53,50 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	75 = ----- x 100% 347 = 21,61 %	232 = ----- x 100% 284 = 81,69 %	324 = ----- x 100% 324 = 100 %

		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	75 = ----- x 100% 81.077 = 0,09 %	1.004 = ----- x 100% 75.771 = 1,33 %	217.987 = ----- x 100% 217.987 = 100 %
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	20 = ----- x 100% 347 = 0,06 %	14 = ----- x 100% 284 = 4,93 %	190 = ----- x 100% 324 = 58,64 %
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	142 = ----- x 100% 347 = 40,92 %	203 = ----- x 100% 284 = 71,48 %	206 = ----- x 100% 324 = 63,58 %
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	18 = ----- x 100% 347 = 5,19 %	88 = ----- x 100% 284 = 30,99 %	80 = ----- x 100% 324 = 24,69 %
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	15 = ----- x 100% 347 = 4,32 %	58 = ----- x 100% 284 = 20,42 %	108 = ----- x 100% 166 = 65,06 %

		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	159 = ----- x 100% 347 = 45,82%	262 = ----- x 100% 284 = 92,25 %	324 = ----- x 100% 324 = 100 %
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	0 = ----- x 100% 347 = 0 %	41 = ----- x 100% 284 = 14,44 %	150 = ----- x 100% 324 = 46,29 %
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	105 = ----- x 100% 708 = 14,83 %	6.973 = ----- x 100% 52.005 = 13,41 %	196 = ----- x 100% 1.811 = 10,82 %
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	111 = ----- x 100% 6.835 = 1,62%	946 = ----- x 100% 51.538 = 1,84%	6.115 = ----- x 100% 16.069 = 38,05 %
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	35 = ----- x 100% 6.700 = 0,52 %	506 = ----- x 100% 50.423 = 1,00 %	7.475 = ----- x 100% 8.495 = 87,99 %
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	156 = ----- x 100% 242 = 64,46%	447 = ----- x 100% 50.423 = 0,89 %	7.290 = ----- x 100% 8.779 = 83,04 %

		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	315 = ----- x 100% 6.835 = 4,60 %	1.871 = ----- x 100% 51.538 = 3,63 %	15.292 = ----- x 100% 16.069 = 95,16 %
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	315 = ----- x 100% 6.835 = 4,60%	562 = ----- x 100% 51.538 = 1,09%	16.069 = ----- x 100% 16.069 = 100 %
2	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0 = ----- x 100% 0 = 0 %	0 = ----- x 100% 0 = 0 %	-
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) = 100 %	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) = 100 %	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) = 100 %
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SII Nas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan	139 = ----- x 100% 7.534 = 1,84 %	15.962 = ----- x 100% 15.962 = 100 %	87 = ----- x 100% 87 = 100 %

		perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	industri di Kabupaten/Kota			
--	--	---	----------------------------	--	--	--

*Data belum rilis oleh lembaga bersangkutan.

Sumber : - LPPD DIY

- LPPD Kabupaten Kulon Progo

- LPPD Kota Yogyakarta

Data yang termuat pada table diatas menunjukkan bahwa posisi Pemerintah Kota Yogyakarta cukup kompetitif dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa indicator yang capaiannya sama atau melebihi capaian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemda DIY pada indicator yang sama. Ada pula indicator yang capaiannya dibawah dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atau Pemda DIY. Untuk itu perlu pencermatan mengenai penyebab dari rendahnya capaian indicator kinerja tersebut dan mencari solusi sebagai jalan keluarnya.

Perbandingan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dengan kinerja Pemerintah Pusat dapat dicermati pada table berikut. Indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perindustrian yang dicantumkan adalah indicator kinerja yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Tabel.3.8

Perbandingan Indikator Kinerja Pemerintah Pusat dan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Organisasi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	Kontribusi koperasi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perkonomian nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,4 %	6,24 %
	Kontribusi UMKM dan kewirausahaan yang produktif, mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian nasional	Persentase kontribusi UMKM terhadap PDB	64 %	60,51 %
		Rasio kewirausahaan nasional	3,21 %	3,04 %
Indikator Kinerja Program				

		Persentase koperasi berkualitas	7,5 %	7,54 %
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	18 %	16,4 %
		Jumlah koperasi modern	150 koperasi	150 koperasi
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	4 %	6,41 %
		Proporsi UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	29,1 %	30,62 %
		Persentase kontribusi UKM terhadap ekspor non migas	16,4 %	11,96 %
		Tingkat implementasi kemitraan strategis UKM	100 %	150 %
		Persentase pertumbuhan wirausaha	2,74 %	9,28 %
		Pertumbuhan start up	150 start up	172 start up
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Meningkatnya peran industry kecil, menengah dan industry aneka dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB industry kecil dan menengah	6,6 %	4,97 %
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan UKM	Nilai omset koperasi	397.157.422.559	397.206.633.350
		Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.760.000.000	5.863.115.800
		Nilai Omset IKM	-	-
	Meningkatnya kinerja sector industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718	18.821
		Nilai Investasi IKM	130.935.000.000	140.000.000.000*
Indikator Kinerja Program				

		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115	115
		Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115	115
		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	690	690
		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27	27
		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100	115
		Jumlah UKM ber-NIB	400	400
		Jumlah UKM Mandiri	40	40
		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	6,9	10,17
		Persentase IKM yang berijin industri	1,8	61,87
		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100	100
		Pendapatan UPT logam	490.500.000	566.776.486

Sumber : - LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023
- LAKIP Kementerian Perindustrian RI Tahun 2023

Apabila dicermati tidak ada indicator kinerja pusat dan daerah yang redaksinya sama persis. Namun masing-masing memiliki hubungan. Indicator kinerja daerah merupakan pembangun dari indicator kinerja pusat. Indicator kinerja daerah memiliki kontribusi pada pencapaian indicator kinerja pusat. Rasio kewirausahaan nasional yang merupakan indicator kinerja sasaran Kementerian Koperasi dan UKM didukung melalui indicator kinerja program Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yakni pada indicator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan. Indicator persentase SDM KUKM yang terlatih didukung oleh indicator kinerja program yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Sedangkan indicator sasaran persentase kontribusi koperasi terhadap PDB milik Kementerian Koperasi dan UKM, tidak ada korelasi langsung dengan indicator kinerja utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Namun indicator kinerja sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yakni nilai omset koperasi dapat menjadi pembangun dan berkontribusi dalam pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut.

Persentase koperasi berkualitas yang merupakan indicator kinerja program Kementerian Koperasi dan UKM sejalan dan sebangun dengan indicator Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik, Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat dan indicator kinerja Jumlah koperasi yang berkembang usahanya milik Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Adapun indicator kinerja utama Kementerian Perindustrian yakni Laju pertumbuhan PDB industry kecil dan menengah juga tidak secara langsung berkorelasi dengan indicator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat Kota Yogyakarta bukan merupakan kawasan industry. Sehingga kontribusi sector industry terhadap PDRB tidaklah besar. Oleh karenanya OPD menentukan indicator kinerja utama yang lebih relevan dengan kondisi industry kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. Namun demikian, indicator kinerja sasaran nilai investasi IKM dapat menjadi pembangun yang berkontribusi pada pencapaian indicator sasaran laju pertumbuhan PDB industry kecil dan menengah di Kementerian Perindustrian RI.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari uraian-uraian sebelumnya, tampak bahwa seluruh indikator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta telah tercapai, bahkan ada yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan dalam urusan industri, koperasi dan UMKM. Sinergitas antara para pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi se-Kota Yogyakarta, Forum Komunikasi UMKM, Dekranasda, Pusat Studi di Perguruan Tinggi dan para ahli/praktisi, mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan IKM (Industri Kecil dan Menengah), koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maju dan berkembang dapat tercapai.
2. Pelaku IKM, UMKM dan pengurus koperasi yang memiliki motivasi tinggi untuk maju dan berkembang.
3. Pelibatan pelaku IKM dan UMKM yang telah sukses pada kegiatan-kegiatan OPD menjadi inspirasi bagi peserta kegiatan untuk mengikuti jejak kesuksesannya.

Selain dipengaruhi oleh factor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, factor penghambat juga membayangi. Factor penghambat yang dihadapi antara lain :

1. Layanan koperasi kurang kompetitif dibanding lembaga keuangan perbankan sehingga kurang menarik minat anggota koperasi.
2. Masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran untuk memiliki legalitas usaha.
3. Aplikasi e-Nglarisi yang kurang *user friendly*.

Untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, maka perlu ditempuh alternative solusi atas factor penghambat yang dapat mengakibatkan kegagalan. Solusi tersebut antara lain :

1. Mendorong koperasi lebih kompetitif dengan meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.
2. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya legalitas usaha dengan melakukan sosialisasi pentingnya legalisasi usaha yang lebih gencar dan melakukan pendampingan pendaftaran legalitas usaha.
3. Bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta untuk mengembangkan aplikasi e-Nglarisi yang lebih mudah bagi pengguna.

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya keuangan. Berbagai upaya efisiensi tersebut antara lain sebagaimana dibawah ini:

a. Efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana

- 1) Mengoptimalkan peran serta SDM yang dimiliki baik ASN maupun non ASN sesuai kompetensinya dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan penghematan/efisiensi biaya honor narasumber/instruktur;
- 2) Efisiensi penggunaan listrik, komputer, AC, lampu, dan air dengan mematikannya saat tidak digunakan;
- 3) Penggunaan kertas bekas untuk cetak dokumen yang masih berupa *draft*;
- 4) Digitalisasi persuratan (melalui e-office dan Srikandi);
- 5) Pengecekan dan pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan secara rutin berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada kendaraan yang mengakibatkan besarnya biaya yang dikeluarkan;
- 6) Merencanakan pengadaan dan belanja barang berdasarkan skala prioritas kebutuhan/urgensi;

- 7) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan mengutamakan gedung milik Pemerintah sehingga menghemat biaya sewa tempat dan jamuan rapat;
- 8) Memilah dan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk menyuburkan tanaman di lingkungan kantor, dan memilah sampah anorganik untuk dikerjasamakan pihak ketiga untuk didaur ulang;

b. Efisiensi sumber daya keuangan

Selama tahun 2024 target kinerja fisik Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tercapai 100%. Pencapaian target fisik ini dibarengi dengan serapan keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Capaian kinerja keuangan atas seluruh sasaran yang ditetapkan telah sesuai target, dengan efisiensi sumber daya keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Nilai (Rp)	%
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	397.157.422.559	397.206.633.350	100,01 %	1.209.197.900	1.209.163.375	99,997 %	34.525	0,003 %
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.760.000.000	5.863.115.800	101,79 %	1.954.786.320	1.946.519.150	99,577 %	8.267.170	0,423 %
Kinerja sektor industri meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718	18.821	100,55 %	53.076.500	53.066.000	99,980 %	10.500	0,020 %
	Nilai Investasi IKM	130.935.000.000	140.000.000.000 *	106,92 %	8.387.835.708	7.971.198.864	95,033 %	416.636.844	0,967 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100 %	6.505.951.565	6.367.722.792	89,721 %	668.731.169	10,279 %

Sumber : SPJ Fungsional Desember 2024, Subbag Keuangan dan PEP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.209.197.900 untuk mendukung indikator Nilai omset koperasi dan Rp 1.954.786.320 untuk mendukung indikator Nilai omset UKM usaha mikro. Dari jumlah

tersebut terealisasi sebesar Rp 1.209.163.375 atau 99,997 % pada indikator Nilai omset koperasi dan Rp 1.946.519.150 atau 99,577 % pada indikator Nilai omset UKM usaha mikro.

Sasaran Kinerja sektor industri meningkat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.387.835.708 untuk indikator Nilai investasi IKM dan Rp 53.076.500 untuk indikator Jumlah tenaga kerja IKM. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 7.971.198.864 untuk indikator Nilai investasi IKM dan Rp 53.066.000 untuk indikator Jumlah tenaga kerja IKM.

Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi sebesar Rp 6.505.951.565 dan terealisasi sebesar Rp 6.367.722.792.

Dengan tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran maka dapat disimpulkan anggaran pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta relevan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Program	Realisasi	Pagu	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115	115	198.013.000	198.013.000	100 %
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115	115	78.509.000	78.509.000	100 %
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	690	690	457.887.400	457.852.875	99,99 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27	27	474.788.500	474.788.500	100 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Jumlah wirausaha baru	100	115	590.146.500	589.684.500	99,92 %

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	yang ditumbuhkan					
		Jumlah UKM ber-NIB	400	400			
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	40	40	1.364.639.820	1.356.834.650	99,43 %
Kinerja sektor industri meningkat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	6,9	10,17	7.615.978.050	7.420.058.968	97,43 %
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	1,8	61,87	21.127.500	20.637.500	97,68 %
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100	100	53.076.500	53.066.500	99,98 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT logam	490.500.000	566.776.486	750.730.158	530.502.396	70,66 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A	A	6.505.951.565	5.837.220.396	89,72 %

Sumber : SPJ Fungsional Desember 2024, Subbag Keuangan dan PEP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Pada tabel 3.10 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program. Seluruh program memiliki realisasi fisik dan anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan memperhatikan ketercapaian IKU di atas 100% dan ketercapaian program di atas 100%, serta rata-rata capaian kegiatan di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-

rata capaian keuangan 93,96 % menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak lebih dari 10%. Deviasi lebih dari 10 % terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan terdapat alokasi gaji dan tunjangan yang memang dianggarkan lebih dari kebutuhan sebagai langkah antisipasi. Selain itu, deviasi juga terjadi pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dikarenakan belanja insentif pegawai BLUD yang tidak dapat terserap seluruhnya disebabkan belum ada regulasi resmi yang memayungi.

3.6. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan pada indikator sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target atau melampaui target kinerja. Terdapat lima indikator kinerja yang mengalami efisiensi dimana target kinerjanya tercapai sedangkan penyerapan anggarannya dibawah 100 %. Efisiensi ini disebabkan oleh kehati-hatian dan kecermatan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan oleh pengampu kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Program Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran Program	Tingkat Efisiensi Program
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	100,01 %	99,997 %	0,003 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100 %	0 %
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100 %	0 %
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	99,99 %	0,01 %
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100 %	0 %
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	101,79 %	99,577 %	0,423 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	589.684.500	99,92 %

					USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
					PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	1.356.834.650	99,43 %
Kinerja sektor industri meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	100,55 %	99,980 %	0,020 %	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20.637.500	97,68 %
	Nilai Investasi IKM	106,92 %	95,033 %	0,967 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.420.058.968	97,43 %
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	53.066.500	99,98 %
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	530.502.396	70,66 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	100 %	89,721 %	10,279 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.837.220.396	89,72 %

Sumber : SPJ Fungsional Desember 2024, Subbag Keuangan dan PEP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Tabel diatas menunjukkan nomenklatur program yang menyumbang efisiensi pada pencapaian masing-masing sasaran IKU. Sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, pada indicator kinerja Nilai omset koperasi efisiensi disumbang oleh Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan pada indicator Nilai omset UKM Usaha Mikro, efisiensi disumbang oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) pada belanja bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja honorarium dan Program Pengembangan UMKM pada belanja sewa gedung, belanja sewa peralatan umum dan belanja iklan/reklame. Sasaran Kinerja sektor industri meningkat efisiensi

disumbang oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada belanja alat tulis kantor, belanja bahan baku, belanja honorarium narasumber, belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga pelayanan umum, belanja tagihan listrik pada UPT Logam, belanja faksimili/internet, belanja registrasi, belanja jasa konsultasi, belanja pemeliharaan bangunan gedung, Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada belanja makanan dan minuman rapat dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja modal peralatan dan mesin BLUD. Sedangkan sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disumbang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya, belanja bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak bea dan perizinan.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

a. Urusan Industri, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

- 1) Pendampingan kepada IKM
- 2) Pelatihan Manajemen Usaha
- 3) Pelatihan Teknis Produksi
- 4) Pelatihan Diversifikasi Produk
- 5) Pelatihan Komunikasi
- 6) Fasilitasi sertifikasi Halal non kuliner.
- 7) Fasilitasi Registrasi HAKI.
- 8) Fasilitasi promosi bagi IKM.
- 9) Bussiness Matching.
- 10) Menjadi bagian dari rantai pasok industry besar.

b. Urusan Koperasi, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

- 1) Pengawasan koperasi.
- 2) Pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat.
- 3) Pemeriksaan kepatuhan koperasi.
- 4) Penilaian kesehatan koperasi.

- 5) Pembinaan koperasi dan kelompok pra koperasi.
 - 6) Bimtek bagi SDM Koperasi.
 - 7) Sosialisasi perkoperasian yang menysasar kaum muda.
 - 8) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- c. Urusan UMKM, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :
- a) Fasilitasi dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi Pelaku UMKM.
 - b) Penumbuhan wirausaha baru.
 - c) Peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
 - d) Fasilitasi sertifikasi Halal bagi pelaku usaha kuliner.
 - e) Kemitraan dengan perguruan tinggi/lembaga Pemerintah/swasta.
 - f) Pameran dan promosi produk UMKM.
 - g) Penguatan pemasaran digital.
 - h) Fasilitasi informasi pembiayaan UMKM.
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah, kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya :
- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
 - b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
 - c) Pengelolaan penatausahaan keuangan.
 - d) Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - e) Pengelolaan arsip secara manual dan digital.
 - f) Pengelolaan pelayanan umum.
 - g) Pengelolaan administrasi umum perkantoran.
 - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

3.8 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, lebih khususnya di sistematika penyusunan dokumen renja tidak tercantum secara eksplisit untuk menyertakan dokumen GAP/GBS sebagai salah satu syarat dalam penyusunannya. Meski demikian, penyusunan GAP/GBS menunjukkan kepedulian pada isu gender yang berkembang.

Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada sebagian kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan dokumen tersebut merupakan salah satu upaya untuk memenuhi unsur Perencanaan Penganggaran Perspektif Gender. GAP dan GBS diterapkan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 413.157.500.

Tabel.3.12

Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024

LANGKAH 1	SKPD		DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM
	PROGRAM		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	KEGIATAN		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
	SUB KEGIATAN		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	INDIKATOR KINERJA		Penumbuhan wirausaha baru, Peningkatan jumlah UKM yang ber-NIB.
	TUJUAN		Menumbuhkan wirausaha baru serta melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro.
LANGKAH 2	DATA PEMBUKA WAWASAN		Data Umum 1. Jumlah pelaku UMKM Kota Yogyakarta 6.835 orang, 80% dari total pendataan masih didominasi perempuan.
LANGKAH 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	<u>Akses:</u> Baik laki-laki maupun perempuan mendapat akses informasi secara seimbang melalui media sosial serta terdapat pendamping sebagai penyebar informasi ke masyarakat. <u>Partisipasi:</u> Tidak ada batasan kriteria peserta berdasarkan jenis kelamin namun pada prakteknya partisipan kegiatan lebih didominasi oleh perempuan <u>Kontrol:</u> Pelaku UMKM laki-laki dan perempuan peserta kegiatan berhak untuk memberikan pendapat atau masukan pada saat pelaksanaan acara <u>Manfaat:</u> Pelaku UMKM memiliki modal pengetahuan untuk meningkatkan kualitas usahanya
LANGKAH 4		Sebab Kesenjangan Internal	- Keterbatasan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan. - Keterbatasan SDM yang memahami kesetaraan gender dan responsif gender - Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa pelaku usaha mikro yang lebih aktif adalah kaum perempuan
LANGKAH 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	- Perempuan cenderung tidak memilih-milih pekerjaan, sehingga berpeluang untuk membangun usaha mikro kecil. - Regulasi terkait isu gender kurang disampaikan.

LANGKAH 6	Reformulasi Tujuan	Mendorong pengembangan UMKM dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM laki-laki dan perempuan
LANGKAH 7	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Home Business Camp (HBC) 2. Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU) 3. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Aplikasi E-Nglarisi
LANGKAH 8	Basis Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada data terpilah skala usaha berdasarkan jenis kelamin 2. Tersedianya data base produk usaha terpilah
LANGKAH 9	Indikator Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas usaha pelaku UMKM laki-laki dan perempuan

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)			
OPD	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM		
TAHUN ANGGARAN	2024		
KEGIATAN	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan		
SUB KEGIATAN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
KODE KEGIATAN	2.17.07.2.01.		
KODE SUB KEGIATAN	2.17.07.2.01.04		
ANALISIS SITUASI	<p>Pemberdayaan UMKM ditujukan untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran usaha mikro kecil dalam pembangunan daerah.</p> <p>Sudah ada beberapa kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM namun kegiatan tersebut masih bersifat netral gender.</p>		
CAPAIAN KEGIATAN	Indikator dan Target Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Wirausaha Baru, 100 wirausaha 2. Peningkatan UKM ber-NIB 400 unit usaha 		
JML. ANGGARAN KEGIATAN	Rp 413.157.500		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pelatihan Home Base Camp (HBC)	
		Keluaran	Pelaksanaan Pelatihan Home Base Camp (HBC)
		Hasil	Terbentuk wirausaha muda baru sebanyak 50 orang
	Kegiatan 2	Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU)	
		Keluaran	Pelaksanaan Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU)
		Hasil	Terbentuk wirausaha baru sebanyak 50 orang
	Kegiatan 3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Aplikasi E-Nglarisi	

		Keluaran	Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Aplikasi E-Nglarisi
		Hasil	UKM Nglarisi mampu menggunakan aplikasi e-Nglarisi

Sumber : Dokumen GAB GBS Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Selain melaksanakan nomenklatur sub kegiatan diatas, bentuk kepedulian gender Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta diwujudkan dengan keterlibatan pada pelaksanaan RANHAM yang didalamnya memuat perhatian pada meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha.

Tabel. 3.13
Implementasi Kebijakan/Program/Kegiatan Tentang Bantuan Usaha dan / atau Membangun Hubungan Kemitraan Bagi Perempuan Kepala Keluarga untuk Berwirausaha

Kebijakan/Program/Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Evaluasi Singkat tentang Kebijakan/Program/Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha		Rencana Tindak Lanjut setelah Evaluasi
	Capaian Keberhasilan	Tantangan dan Kendala	
Program Pemberdayaan UMKM, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30 Perempuan Kepala Keluarga mengikuti kegiatan Telah dilakukan kerjasama pemanfaatan akses data kependudukan	Banyak pendaftar intervensi yang berasal dari luar Kota Yogyakarta Akses jaringan sering terganggu	Berkoordinasi dengan BPKAD mengenai kemungkinan mengakomodir antusiasme penduduk luar Kota Yogyakarta Memberikan masukan kepada stakeholder terkait untuk memperkuat infrastruktur jaringan teknologi informasi

Sumber : Laporan Aksi 1 RANHAM 2024

3.9 Inovasi

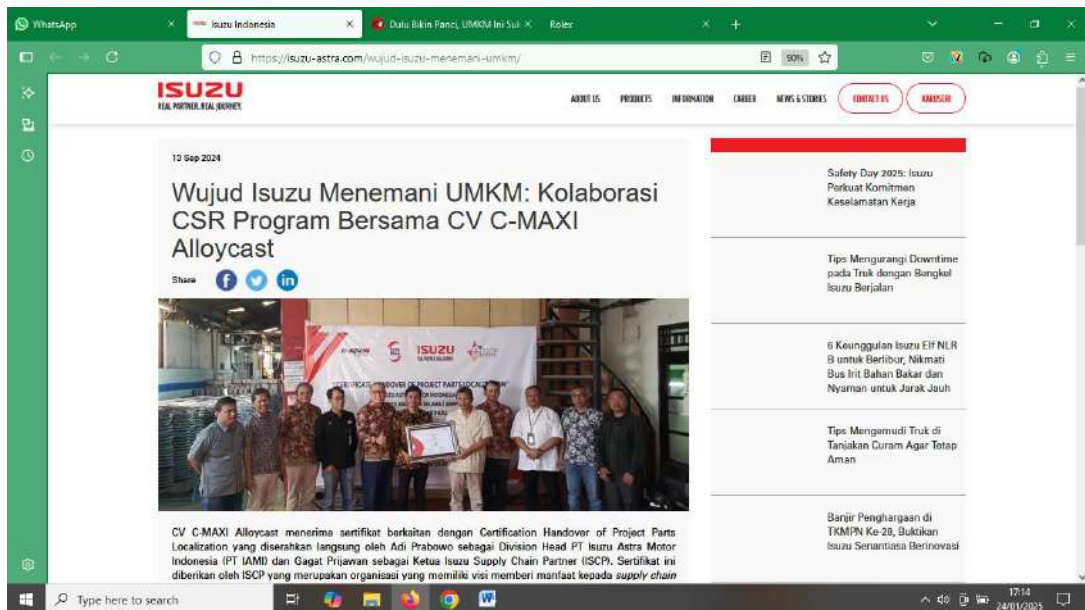
Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial dan google untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Melakukan pemilihan Duta Muda Koperasi untuk meningkatkan wawasan perkoperasian bagi kalangan muda.

3. Melaksanakan SAKA Wirausaha yang merupakan wadah wadah bagi para penegak dan pandega Pramuka untuk mengembangkan bakat dan minat dalam kewirausahaan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan wirausaha muda melalui kegiatan Pramuka.
4. Penggunaan aplikasi e-Nglarisi sebagai sarana UMKM/IKM untuk menjadi penyedia jasa konsumsi rapat/pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu aplikasi e-Nglarisi digunakan sebagai alat untuk memantau sejauh mana anggaran jamuan rapat mendorong pengembangan UMKM/IKM kuliner.
5. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar pihak. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain :
 - Perjanjian kerjasama HKI (Hak Kekayaan Intelektual) antara para desainer industry dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh UPT Logam. Melalui perjanjian ini, para desainer akan lebih mudah dalam melakukan monetisasi HKI. Monetisasi adalah upaya untuk menjadikan segala sesuatu yang bernilai menjadi uang. Pada perjanjian kerjasama ini, diatur bahwa bagi hasil untuk inventor adalah 90 persen sementara UPT Logam mendapatkan 10 persen dari royalty yang didapatkan. Model kerjasama ini menjadi model kerjasama yang cukup menarik bagi para inventor untuk menjual kreasinya sekaligus sebagai stimulant bagi mereka untuk terus berkarya.
 - PDIN merupakan rumah berbagai elemen untuk berkarya . Interaksi antar masing masing elemen akan menghasilkan kolaborasi karya yang pada ujungnya akan bermanfaat bagi pengembangan IKM. Salah satu komunitas yang berkarya di PDIN adalah Jogjakarya. Komunitas media digital yang terdiri dari berbagai elemen pelaku industri digital marketing. PDIN bekerjasama dengan Jogjakarya untuk melakukan aktivasi kegiatan PDIN dengan mengadakan pelatihan *Digital Selling* dan pelatihan *live host*. Pelatihan gratis dilaksanakan sepanjang tahun dan terbuka bagi masyarakat . Output dari kegiatan ini adalah aktivasi PDIN dengan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kedepan, diharapkan kegiatan ini akan memberikan dukungan selling kepada produk IKM kota Yogyakarta.
6. Meningkatkan upaya untuk menjadi bagian dari rantai pasok industry besar.
 - UPT Logam menyupayakan keterlibatan IKM kedalam rantai pasok industry nasional. Dengan menjadi supplier bagi industry besar, setidaknya IKM dapat mengamankan produksi sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan. Tahun 2024, 2 IKM

binaan UPT Logam yaitu ED Alumunium dan TS Alumunium kedalam rantai pasok industry nasional, melalui anak perusahaannya yang bernama CV C-Maxi telah sukses menjadi supplier industry otomotif Astra. IKM ini memasok *part radiator* bagi ISUZU. Sedangkan TS Alumunium melalui anak perusahaannya yakni PT Aluka telah berhasil mensupply beberapa perusahaan besar, salah satunya menjadi supplier pada Tier 3 PT Astra.

Gambar 1.3
Penyerahan Sertifikat Kepada IKM yang Menjadi Bagian dari Rantai Pasok Industri besar



- Pada tahun 2024, UPT Logam / PDIN bersama pelaku IKM mengupayakan kerjasama supply produk kerajinan ke Inggris. Proses yang cukup lama dan diinisiasi sejak tahun 2023. Setelah melalui serangkaian koordinasi, pengiriman sampel, audit teknologi, kemampuan, dan proses serta pemenuhan persyaratan administrasi ekspor, pada tahun 2024 pemesanan pengadaan dies telah diajukan oleh pihak importer (Coxlondon). Produk yang akan dibuat adalah *part* berbentuk daun yang nantinya akan dirangkai menjadi lampu. *Proses assembly* akan dilakukan di Inggris. Untuk bisa memproduksi *part* berbentuk daun tersebut, diperlukan mesin *stamping* kapasitas 80 Ton dan seperangkat *dies* (1 *dies blanking* dan 1 *dies forming*). Teknologi *stamping* untuk memproduksi *part* tersebut termasuk didalamnya pembuatan *dies* merupakan teknologi proses yang memerlukan pemahaman proses yang cukup. Diperlukan waktu yang cukup untuk meyakinkan pihak customer dari Inggris bahwa IKM dengan support UPT Logam/PDIN mampu menyediakan *supply* yang diharapkan. Untuk diketahui,

bahwa, pihak coxlondon mendapatkan supply part sebelumnya dari Italia. Coxlondon membutuhkan supplier dengan kemampuan *craftman skills* , pemahaman *engineering* yang cukup dan *attitude* kerjasama yang baik. Untuk memastikan bahwa *supplier* memiliki itu semua , maka Coxlondon sangat berhati hati dalam memutuskan untuk memberikan pesanan kepada supplier. Berikut foto dies yang telah dibuat oleh IKM bersama UPT Logam untuk pekerjaan tersebut

Gambar 1.4

Perangkat Dies yang dibuat oleh IKM untuk memenuhi Pesanan dari Inggris



3.10 Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melakukan kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Para pemangku kepentingan ini berasal dari internal pemerintahan maupun pihak non pemerintahan. Kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan organisasi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14

Inventarisasi Peran Lintas Sektor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024

No	Pihak / Stakeholder	Kontribusi	Manfaat	
			Bagi OPD	Bagi Kelompok Sasaran
1	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Memberikan arah kebijakan, konsultasi dan fasilitasi dalam	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian,	Memperbesar peluang koperasi dan UMKM di

		program kerja yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM	Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta untuk lebih berkembang
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Memberikan arah kebijakan, konsultasi dan fasilitasi dalam program kerja yang berkaitan dengan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperbesar peluang IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Yogyakarta untuk lebih berkembang
3	Lembaga Keuangan (Bank BPD, Bank Jogja)	Memberikan literasi keuangan kepada kelompok sasaran Penyampaian informasi pinjaman yang dapat diakses oleh UMKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait finansial Mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan
3	Perusahaan industry nasional	Menjadi pihak yang menggunakan produk-produk IKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan kualitas produk UMKM/IKM dan kepercayaan konsumen
4	Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta	Menyediakan gerai untuk UMKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan promosi dan penjualan produk UMKM
5	Forkom UMKM	Menjadi wadah bagi UMKM di wilayah	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperoleh informasi mengenai program kerja OPD dan cara mengaksesnya, membangun jejaring antar pelaku UMKM
6	LPPM UII	Memberikan edukasi mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait HAKI
7	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Memberikan edukasi dan menerbitkan sertifikasi P-IRT	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan kualitas produk UMKM/IKM dan kepercayaan konsumen
8	Pelaku bisnis	Turut serta dalam kegiatan pertemuan antara pelaku bisnis dengan calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan dan investor (business matching)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperluas koneksi dan peluang usaha bagi IKM/UMKM

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan ditingkatkan upaya untuk mencapainya.

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, seluruh sasaran perangkat daerah meraih kriteria kinerja "Sangat Baik". Sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat tercapai 100,01 % dan 101,79 %. Sasaran kinerja sector industry meningkat terealisasi 100,55 % dan 106,92 %. Sedangkan sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi 100 %.
2. Realisasi kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara umum telah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir periode Renstra 2023 – 2026. Dengan demikian, target akhir Renstra 2023 – 2026 optimis dapat tercapai.
3. Program, kegiatan dan anggaran pada Tahun 2024 sangat efektif dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU.
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih peningkatan kinerja tetap harus dilakukan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melanjutkan penumbuhan wirausaha baru yang dilengkapi dengan pendampingan
2. Perluasan kemitraan UMKM
3. Pelatihan dengan system berjenjang dan pendampingan secara massif dan komprehensif
4. Meningkatkan dukungan dan sinergi dengan para stakeholders terkait inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran,

sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi.

5. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pemanfaatan produk IKM/UKM.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Pohon Kinerja

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

Lampiran 5. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya

Lampiran 6. Prestasi

Lampiran 1. Pohon Kinerja

POHON KINERJA DINAS PERINKOPIUKM TAHUN 2024

	SASARAN DAERAH									
Sasaran Kota	Meningkatnya Perekonomian yang Adil dan Merata									
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja:									
	1. Pertumbuhan Ekonomi									
	2. Rasio PDRB industri pengolahan									
	3. Tingkat pengangguran terbuka									
Kinerja Utama	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM			Meningkatnya Produktivitas sektor Industri			Meningkatnya Produktivitas sektor Koperasi			
Indikator Kinerja Utama	Nilai Omset Usaha Mikro Tahun - n			IK : 1. Nilai investasi IKM 2. Nilai produksi IKM			Omset Koperasi tahun n			
CSF	Meningkatnya Wirausaha Baru	Meningkatnya UMKM Moderate	Meningkatnya UMKM Mandiri	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri	Meningkatnya kualitas produk industri	Meningkatnya layanan Industri	Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi	Meningkatnya akuntabilitas koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya	
Indikator Kinerja	IK : Jumlah Wirausaha Baru	IK : Jumlah UMKM Moderate	IK : Jumlah UKM mandiri	IK : Persentase usaha IKM yang memenuhi standarisasi	IK : Persentase Produk yang terstandarisasi	IK : Pendapatan UPT	Jumlah SDM koperasi yang tersertifikasi	Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (volume usaha, pelaksanaan RAT)	
Initial Outcome	Meningkatnya intervensi dasar wirausaha	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Meningkatnya pengembangan UMKM	Meningkatnya pengembangan pelaku IKM	Meningkatnya penguatan sarana dan prasarana industri	Meningkatnya layanan BLUD yang tersedia	Meningkatnya literasi perkoperasian	Meningkatnya penguatan kapasitas SDM koperasi	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Meningkatnya kemitraan dan pengembangan koperasi
Indikator Kinerja	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan intervensi dasar wirausaha	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pemberdayaan	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pengembangan	Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan intervensi pengembangan/lanjutan	Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan intervensi penguatan sarana dan prasarana industri	Jumlah layanan BLUD yang tersedia	Jumlah masyarakat yang meningkat literasi perkoperasiannya	Jumlah SDM yang mengikuti penguatan kapasitas SDM koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi kemitraan dan pengembangan

Output

1. Updating data UMKM	1. Pelatihan lanjutan (HBC,KaMU, Nglarisi)	1. Promosi dan publikasi	1. Bimbingan Teknis untuk SDM Industri	1. Penguatan sentra (Kelembagaan dan Sarpras penunjang)	1. Penyediaan Layanan UPT Desain dan Industri	1. Penyuluhan pra koperasi	1. Diklat sertifikasi dan kompetensi perkoperasian	1. Updating data koperasi	1. Kemitraan koperasi
IK : Data UMKM yang tersedia	IK : Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan lanjutan	IK : Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi promosi dan publikasi	IK : Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan intervensi penguatan sarana dan prasarana industri	IK : Jumlah Intervensi yang dilakukan	IK : Jumlah pengguna layanan Logam	IK : jumlah kelompok pra koperasi	IK : Jumlah SDM koperasi yang mengikuti diklat	IK : Data koperasi yang tersedia	IK : Jumlah koperasi yang melaksanakan kemitraan
2. Pelatihan dasar	2. Pendampingan (HBC,KaMU, Nglarisi)	2. Kurasi dan pameran	2. Fasilitasi Izin Usaha Industri	2. Fasilitasi kegiatan Dekranasda	2. Penyediaan Layanan HKI	2. Pemilihan Duta Muda Koperasi	2. BIMTEK perkoperasian	2. Pemeringkatan koperasi	2. Fasilitasi peningkatan Layanan Koperasi
IK : Jumlah pelaku UKM yang mengikuti pelatihan dasar	IK : Jumlah UMKM yang didampingi	IK : Jumlah UMKM yang mendapat kurasi dan mengikuti pameran	IK : Jumlah Usaha IKM yang mendapatkan sosialisasi perizinan usaha [PIRT/sertifikasi halal/SNI/NIE(MD, TR, NA)]	IK : Jumlah kegiatan Dekranasda yang difasilitasi	IK : Jumlah pengguna layanan Hki	IK : Jumlah Duta Muda koperasi yang mempunyai pengetahuan perkoperasian	IK : Jumlah SDM koperasi yang mengikuti BIMTEK perkoperasian	IK : Jumlah koperasi yang mengikuti pemeringkatan	IK : Jumlah Koperasi yang Layanannya Meningkat
3. Penyusunan kurikulum pelatihan UMKM	3. Fasilitasi perizinan usaha (NIB, Halal, PIRT, Merk)	3. Kemitraan dan pembiayaan	3. Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha	3. Pengembangan Akses Pasar	3. Kemitraan (UPT)	3. Koperasi goes to school		3. penilaian kesehatan koperasi	3. Promosi
IK : Kurikulum pelatihan UMKM yang tersusun	IK : Jumlah UMKM yang difasilitasi perizinan usaha	IK : Jumlah UMKM yang bermitra	IK : Jumlah IKM yang diperiksa ketepatan terhadap perizinan usaha industri	IK : jumlah IKM yang difasilitasi akses pasar	IK : Jumlah kemitraan yang ditindaklanjuti	IK : Jumlah sekolah yang mendapatkan edukasi perkoperasian		IK : Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	IK : Jumlah anggota koperasi yang produknya mendapatkan fasilitasi promosi
		6. Sertifikasi SDM (Mentor)	4. Kemitraan Sumber Daya Industri	4. Business Matching		4. Debat perkoperasian			
		IK : Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi	IK : Jumlah kemitraan yang terbangun/ terjalin	IK : Jumlah IKM yang mengikuti business matching		IK : Jumlah peserta yang mengikuti debat			
			5. Sinkronisasi rencana industri dengan rencana tata ruang	5. Data dan Informasi Yang terintegrasi					
			IK : Jumlah kesesuaian rencana industri dengan rencana tata ruang	IK : Persentase update data					
			6. Penguatan kapasitas dan kelembagaan Sentra						
			IK : Jumlah sentra yang didampingi						

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2024



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ꦥꦺꦩꦸꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦶꦥꦺꦩꦶꦤꦠꦶꦂꦶꦤꦏꦺꦑꦸꦫꦶꦥꦸꦤꦠꦶꦁꦏꦺꦴꦕꦺꦴꦩꦺꦤꦺꦁ

Jl. Kenari No. 66 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332

EMAIL : perinkopukm@icjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : pnk@icjakota.go.id

WEBSITE : www.icjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed
Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Yogyakarta, 9 Januari 2024
Pihak Pertama

Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si
NIP. 19670119 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	369.330.174.952 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	5.760.000.000 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718 Orang
		Nilai Investasi IKM	19.165.867.834 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi UKM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 102.779.000,00	APBD
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 78.514.000,00	APBD
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 420.551.525,00	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 361.338.500,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 590.146.500,00	APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.057.487.820,00	APBD
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 7.845.895.750,00	APBD
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 33.127.500,00	APBD
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 52.958.600,00	APBD
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.060.507.640,00	APBD

Wali Kota Yogyakarta

SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Yogyakarta, 9 Januari 2024
 Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha
 Kecil dan Menengah

Drs. TRI KARYADI RIYANTO, S.H., M.Si
 NIP. 19670119 199203 1 005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ديناسترى كوتا يوجيكرتا
ديناسترى بربوندي كوتا يوجيكرتا

Il. Kerati No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332

EMAIL : perinkopukm@yogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upk@yogjakota.go.id

WEBSITE : www.yogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.

Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Pihak Kedua

Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Pihak Pertama

Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si
NIP. 19670119 199203 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	397.157.422.559 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	5.760.000.000 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718 Orang
		Nilai Investasi IKM	130.935.000.000 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi UKM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 198.013.000,00	APBD PERUBAHAN
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 78.509.000,00	APBD PERUBAHAN
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 457.887.400,00	APBD PERUBAHAN
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 474.788.500,00	APBD PERUBAHAN
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 590.146.500,00	APBD PERUBAHAN
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.364.639.820,00	APBD PERUBAHAN
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 7.615.978.050,00	APBD PERUBAHAN
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 21.127.500,00	APBD PERUBAHAN
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 53.076.500,00	APBD PERUBAHAN
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.256.681.723,00	APBD PERUBAHAN

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Pihak Kedua



J. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Pihak Pertama



Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si
NIP. 19670119 199203 1 005

Lampiran 3. Rencana Aksi

RENCANA AKSI
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024

2	3	4	Target Kinerja Triwulan				9	10	11	Target Kinerja Triwulan			
			5	6	7	8				12	13	14	15
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	3397.157.422.559 Rupiah	353.215.908.457 Rupiah	381.559.221.836 Rupiah	307.387.436.687 Rupiah	397.157.422.559 Rupiah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	40 Koperasi	75 Koperasi	0 Koperasi	115 Koperasi
							PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	10,07 %	33,28 %	70,47 %	100,00 %
							Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	115,00 koperasi	10,07 %	33,28 %	70,47 %	100,00 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27,00 Unit	0,00 Unit	0,00 Unit	9,00 Unit	27,00 Unit
							PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	4,00 %	51,00 %	99,84 %	100,00 %
							Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27,00 Unit Usaha	4,00 %	51,00 %	99,84 %	100,00 %
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115,00 Koperasi	40,00 Koperasi	115,00 Koperasi	115,00 Koperasi	115,00 Koperasi
							PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATUDAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	19,00 %	30,00 %	100,00 %	100,00 %
							Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115,00 koperasi	19,00 %	30,00 %	100,00 %	100,00 %
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	690,00 SDM	0,00 SDM	690,00 SDM	0,00 SDM	690,00 SDM
							PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	10,00 %	85,01 %	99,09 %	100,00 %
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590,00 Orang	10,00 %	85,01 %	99,09 %	100,00 %
	Nilai Omset UKM Usaha Mikro	5.760.000.000 Rupiah	400.000.000 Rupiah	2.680.000.000 Rupiah	2.680.000.000 Rupiah	5.760.000.000 Rupiah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	400 UKM	100 UKM	200 UKM	300 UKM	400 UKM

							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590.00 Orang	10,00 %	85,01 %	99,09 %	100,00 %
	Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	5.760.000.000 Rupiah	400.000.000 Rupiah	2.680.000.000 Rupiah	2.680.000.000 Rupiah	5.760.000.000 Rupiah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	400 UKM	100 UKM	200 UKM	300 UKM	400 UKM
								Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100 UKM	0 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM
							PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN KEMITRAAN KEMUDAHAN PERIZINAN PENGLIATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN		100,00 %	41,74 %	72,87 %	90,00 %	100,00 %
							Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3600,00 unit usaha	10,30 %	46,32 %	75,87 %	100,00 %
							Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	120,00 unit usaha	58,90 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100,00 unit usaha	47,01 %	72,28 %	94,14 %	100,00 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	40,00 UKM	0,00 UKM	0,00 UKM	0,00 UKM	40,00 UKM
							PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL		100,00 %	15,29 %	59,99 %	81,68 %	100,00 %
							Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi	285,00 Unit Usaha	15,29 %	59,99 %	81,68 %	100,00 %
Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718 Orang	17.000 Orang	17.500 Orang	18.000 Orang	18.718 Orang	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %	0 %	0 %	80 %	100 %
							PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI/PUI/IKI DAN IPI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		100,00 %	0,00 %	1,89 %	74,17 %	100,00 %
							Facilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1,00 Dokumen	0,00 %	1,89 %	74,17 %	100,00 %
	Nilai Investasi IKM	130.935.000.000 Rupiah	16.300.000.000 Rupiah	17.050.000.000 Rupiah	18.250.000.000 Rupiah	130.935.000.000 Rupiah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	6,97 %	6,37 %	6,45 %	6,65 %	6,97 %
							PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		100,00 %	9,86 %	34,97 %	76,43 %	100,00 %
							Koordinasi Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan					

							Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2,00 Dokumen	22,25 %	48,13 %	74,06 %	99,99 %
							Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2,00 Dokumen	0,00 %	26,37 %	95,07 %	100,00 %
							Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,00 Dokumen	0,00 %	16,56 %	63,09 %	100,00 %
							Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,00 Dokumen	17,18 %	48,80 %	72,89 %	100,00 %
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berjin Industri	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
							PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKIDAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKIKEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		99,99 %	0,00 %	35,22 %	100,00 %	99,99 %
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan salah bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2,00 Dokumen	0,00 %	35,22 %	100,00 %	99,99 %
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
							PERENCANAAN/PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Pendapatan UPT Logam	512.723.000 Rupiah	128.286.250 Rupiah	249.262.500 Rupiah	369.987.750 Rupiah	512.723.000 Rupiah
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00 Dokumen	67,40 %	77,40 %	95,00 %	100,00 %
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	25,00 %	50,00 %	90,00 %	100,00 %
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	65,00 %	65,00 %	85,00 %	100,00 %

		Jumlah Dokumen DPA, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00 Dokumen	65,00 %	65,00 %	85,00 %	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.00 Dokumen	55,00 %	75,00 %	90,00 %	100,00 %
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100,00 %	29,00 %	63,00 %	84,00 %	100,00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33.00 Orang/Bulan	37,00 %	79,00 %	100,00 %	100,00 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	25,00 %	60,00 %	77,00 %	100,00 %
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.00 laporan	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.00 dokumen	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100,00 %	18,25 %	72,50 %	93,25 %	100,00 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 paket	12,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket	11,00 %	88,00 %	100,00 %	100,00 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.00 dokumen	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 laporan	25,00 %	62,00 %	98,00 %	100,00 %
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00 unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100,00 %	64,20 %	76,39 %	88,55 %	100,00 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100,00 %	18,25 %	72,50 %	93,25 %	100,00 %
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 paket	12,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket	11,00 %	88,00 %	100,00 %	100,00 %
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.00 dokumen	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 laporan	25,00 %	62,00 %	98,00 %	100,00 %
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00 unit	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100,00 %	64,20 %	76,39 %	88,55 %	100,00 %
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
						Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 laporan	70,00 %	82,00 %	94,00 %	100,00 %
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.00 Laporan	22,60 %	47,17 %	71,06 %	100,00 %
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100,00 %	45,48 %	60,16 %	86,84 %	100,00 %
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	10,00 %	60,00 %	85,00 %	100,00 %
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20.00 Unit	17,43 %	47,48 %	75,52 %	99,99 %
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 unit	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
						PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		100,00 %	27,00 %	66,55 %	89,34 %	100,00 %
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kega	27,00 %	66,55 %	89,34 %	100,00 %

Yogyakarta,

Drs. TRI

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

simoneva.jogjakota.go.id/#/opd/IndSsrO

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA

Rabu, 29 Januari 2025 9:19:49

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW

Indikator Sasaran TW

Indikator Program TW

Sasaran Program TW

Ev RENJA Per TW

Indikator Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan TW

Indikator Sasaran 2024

Indikator Sasaran Per Tahun

Tahun: 2024

Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nama Indikator Sasaran:

+ Tambah

Aksi	No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Formulasi	Metodologi	Target/Satuan	Fisik TW 1	Fisik TW 2	Fisik TW 3	Fisik TW 4	Persen TW 1	Persen TW 2	Persen TW 3
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omsset Koperasi	Omsset Koperasi = Omsset Koperasi Yang Dibina tahun n	Omsset Koperasi = Koperasi dihitung dari Kesejahteraan anggota koperasi meningkat dihitung dan Omsset Koperasi n	3397.157.422.559 Rupiah	353.788.268.836	378.096.694.795	390.400.412.280	397.200.633.350	100.16	104.57	106.26

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA

Rabu, 29 Januari 2025 9:21:26

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW

Indikator Sasaran TW

Indikator Program TW

Sasaran Program TW

Ev RENJA Per TW

Indikator Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan TW

Indikator Sasaran 2024

Indikator Sasaran Per Tahun

Tahun: 2024

Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nama Indikator Sasaran:

+ Tambah

Aksi	No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Formulasi	Metodologi	Target/Satuan	Fisik TW 1	Fisik TW 2	Fisik TW 3	Fisik TW 4	Persen TW 1	Persen TW 2	Persen TW 3
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai Omsset UKM Usaha Mikro Tahun n	Nilai Omsset UKM Usaha Mikro tahun n = Nilai Omsset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n	Nilai Omsset UKM Usaha Mikro tahun n dihitung dari Kesejahteraan pelaku UKM meningkat dihitung dari Nilai Omsset UKM usaha mikro n	5.780.000.000 Rupiah	618.110.390	2.080.000.000	4.306.737.310	5.863.115.800	154.52	100.00	160.69
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Jumlah Tenaga Kerja IKM tahun n	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718 Orang	17.944	17.944	17.944	18.821	105.00	102.54	99.68
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Nilai Investasi IKM	Nilai Investasi IKM = Nilai investasi IKM yang dibina tahun n	Nilai Investasi IKM dihitung dari Nilai investasi IKM yang dibina tahun n	130.935.000.000 Rupiah	129.830.452.498	129.830.452.498	129.830.452.498	140.000.000.000	796.50	761.46	711.39

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:24:36

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan
Sasaran Sub Kegiatan TW

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik = Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	115	115	115	40	75	0	115	2024

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:28:18

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	21	27	39	0	0	9	27	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:27:12

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat = Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat tahun n	115	115	115	40	115	115	115	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:28:03

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi = Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	615	690	690	690	0	690	2024	

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:29:00

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM ber-NIB = Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	425	400	400	100	210	300	400	2024

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	(2347) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan = Jumlah wirausaha baru ditumbuhkan tahun n	100	100	100	0	110	110	115	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:29:49

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM Mandiri = Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	35	40	50	0	0	0	40	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:31:24

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Kegiatan

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	Persentase IKM yang berizin industri = (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	12,05	6,07	8,30	4,31	5,25	6,08	10,17	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:32:28

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Keolatan

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA	Persentase IKM yang berizin industri	Persentase IKM yang berizin industri = (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	3,86	1,87	2,40	22,75	22,75	61,91	61,87	2024

SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA Rabu, 29 Januari 2025 9:33:07

Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

PENGUKURAN
KINERJA TW
Indikator Sasaran TW
Indikator Program TW
Sasaran Program TW
Ev RENJA Per TW
Indikator Keolatan

Indikator Program Tahun 2024

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2024
Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update = (Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM x 100%	100	100	100	0	0	80%	100	2024



Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos
Profile Logout

Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

+ Tambah Indikator

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A	A		A	A	A	A	2024

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	(2496) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Logam	Pendapatan UPT Logam tahun n	467.746.358	512.723.000	440.000.000	228.484.015	361.000.392	514.167.445	566.776.486	2024

PENGUKURAN

KINERJA TW

- Indikator Sasaran TW
- Indikator Program TW
- Sasaran Program TW
- Ev RENJA Per TW
- Indikator Kegiatan

Dashboard
 Input Data
 Monitoring Kinerja TW
 Desk
 Upload LRP
 Laporan

Lampiran 5. Tindak Lanjut LHE SAKIP

**MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP DINAS PERINKOPUKM TAHUN 2023**

No	Rekomendasi LHE SAKIP 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target waktu	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Pelaksanaan
1	Terus meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam koordinasi pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan	Meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam koordinasi pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan	12 bulan	Januari - Desember 2024	Sekretariat	Dilaksanakan
2	Terus meningkatkan kualitas dokumentasi proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan	Meningkatkan keandalan informasi kinerja dan penyajian perbandingan data kinerja	12 bulan	Januari - Desember 2024	Subbag Keuangan dan PEP	Dilaksanakan
3	Terus mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja yang dijalankan	Mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja yang dijalankan	12 bulan	Januari - Desember 2024	Subbag Keuangan dan PEP	Dilaksanakan

Lampiran 6. Prestasi

Pada tahun 2024 UPT Logam mengupayakan IKM aluminium binaannya menjadi supplier bagi industry besar dalam rantai pasok industry nasional. ED Aluminium dan TS Aluminium berhasil menjadi supplier bagi industry otomotif Astra. Hal ini merupakan sebuah prestasi mengingat industry besar hanya mau bekerjasama dengan IKM yang bonafit dan professional, yakni IKM yang bias menjamin kualitas, waktu delivery dan biaya sesuai yang dipersyaratkan (Q-C-D). keterlibatan dalam rantai pasok industry nasional juga bias menjadi protfolio yang baik bagi IKM dalam memperluas pasar. IKM yang pernah terlibat dalam rantai pasok industry besar bias menawarkan jasa supply ke industry besar yang lain karena system dan karakter budaya kerjanya yang sudah terbentuk dengan baik.

Gambar.....

Penyerahan *Certification Handover of Project Parts Localization* yang diserahkan langsung oleh Adi Prabowo sebagai Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (PT IAMI) dan Gagat Prijawan sebagai Ketua Isuzu Supply Chain Partner (ISCP)



<https://www.gridoto.com/amp/read/224168128/dulu-bikin-panci-umkm-ini-sukses-bikin-header-intercooler-oem-isuzu>

Selain itu, UPT Logam juga menjalin kerja sama supply produk kerajinan ke Inggris. Produk yang akan dibuat adalah part berbentuk daun yang nantinya akan dirangkai menjadi lampu. Untuk

bias memproduksi part tersebut, diperlukan mesin stamping kapasitas 80 ton dan seperangkat dies. Mesin tersebutlah yang disiapkan oleh IKM binaan UPT Logam. Hal ini merupakan sebuah prestasi mengingat proses yang panjang dan ketat. Melalui serangkaian koordinasi, pengiriman sampel, audit teknologi, kemampuan dan proses, serta pemenuhan persyaratan ekspor.

Gambar.....

Proses koordinasi dengan pihak importer Inggris, Coxlodon, dalam rangka kerjasama supply produk kerajinan ke Inggris



Gambar.....

Perangkat mesin dies yang disiapkan oleh IKM binaan UPT Logam

